

ABSTRAKSI

Saat ini, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya akan melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan skala besar-besaran. Oleh karena dan untuk itu, Pemerintah Daerah setempat melakan upaya-upaya prefentif agar supaya kegiatan pelepasan tanah tersebut tidak berujung pada permasalahan hukum. ‘‘Perda pelepasan surat ijo sudah ada, dan Perwali juga sudah disiapkan,’’ kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pihak pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai mekanisme pelepasan hak atas tanah oleh Pemerntah Kotamadya Surabaya.

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Pelepasan Tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan diundangkan pada 28 Januari 2015. Perda ini menjelaskan tentang pelepasan hak atas tanah dari tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut diatas adalah solusi yang dianggap solutif untuk rencana program pelepasan hak atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Surabaya agar tidak berujung pada masalah hukum. Penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab poteni permasalahan yang akan muncul.

ABSTRACTION

Currently, the government of Surabaya Municipality will relinquish the rights to the land which it controls on a large scale. Therefore and for that reason, the local government has done preventive efforts so that the release of the land will not lead to legal problems. " Perda release Surat ijo already exist, and Perwali also been prepared, " said the Mayor of Tri Rismaharini Surabaya. The local government has issued policies on the mechanism of disposal of land rights by the Municipal Government of Surabaya.

On August 15, 2014, the municipal government of Surabaya Municipality has adopted a regional regulation on land acquisition of Surabaya Municipal Government's assets and enacted on January 28, 2015. This law explains the release of land rights from land controlled by the municipal government of Surabaya .

Preventive efforts undertaken by the Regional Government mentioned above is a solution that is considered solutif for the plan of the release of land rights programs controlled by the Municipal Government of Surabaya in order not to culminate in legal issues. This research is made to be able to answer the potential problems that will arise.